

STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI BENGKULU DALAM MENSOSIALISASIKAN LITERASI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN PENYIARAN SEHAT

Dea Selviayana, Eti Efrina

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

deaselviayana@gmail.com

etiefrin@gmail.com

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi yang bertujuan sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Salah satu fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu adalah memberikan edukasi bagi masyarakat guna menekan dampak negatif dari penyiaran yang ada. Dampak penyiaran yang tidak berkualitas berakibat buruk terhadap perkembangan sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda penerus bangsa, hal tersebut mengakibatkan *human resource investment versus human resource impact*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dalam Mensosialisasikan Literasi Media Dalam Mewujudkan Penyiaran Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Pelaksanaan sosialisasi literasi media dalam mewujudkan penyiaran sehat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu memiliki tim riset, dengan tujuan untuk melihat bagaimana dampak dari penyiaran yang dilakukan oleh berbagai media terhadap masyarakat. Adapun pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu tentang Literasi media dilakukan dalam bentuk pelaksanaan yaitu, pelaksanaan langsung bentuk kegiatannya literasi media dan P3SPS.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi, Literasi Media, Penyiaran sehat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI BENGKULU DALAM MENSOSIALISASIKAN LITERASI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN PENYIARAN SEHAT

Abstract

The Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) is an independent state institution in Indonesia which was established in every province with the aim of being a regulator of broadcasting in every province in Indonesia. One of the functions of the Bengkulu Province Regional Indonesian Broadcasting Commission is to provide education for the public in order to reduce the negative impacts of existing broadcasting. The impact of low-quality broadcasting has a negative impact on the development of human resources, especially for the nation's young generation, this results in human resource investment versus human resource impact. The aim of this research is to find out how the Bengkulu Regional Indonesian Broadcasting Commission's Communication Strategy is in Promoting Media Literacy in Realizing Healthy Broadcasting. The research method used is qualitative descriptive. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of the research obtained were the implementation of media literacy socialization in realizing healthy broadcasting. The Bengkulu Province Regional Indonesian Broadcasting Commission had a research team, with the aim of seeing the impact of broadcasting carried out by various media on society. The implementation of socialization carried out by the Bengkulu Regional Indonesian Broadcasting Commission regarding media literacy was carried out in the form of implementation, namely, direct implementation in the form of media literacy and P3SPS activities.

Keywords: Communication Strategy, Socialization, Media Literacy, Broadcasting healthy, Regional Indonesian Broadcasting Commission.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini kita tidak dapat menolak kemajuan dan masuknya teknologi informasi, ditambah dengan kondisi negara kita yang mulai memasuki era baru dimana suasana demokrasi mulai ditegakkan. Terlebih pada saat ini hampir seluruh stasiun siaran televisi swasta banyak menyajikan program-program acara yang memang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang jam tayangnya justru pada saat anak-anak membutuhkan hiburan setelah pulang sekolah atau pada sore hari.

Terlihat dari indeks kualitas siaran yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang yang tidak pernah berada diangka yang elah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk mempermudah pengawasan didaerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Und

ang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disetiap Provinsi juga dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diseluruh Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan sebuah lembaga negara independen di indonesia yang didirikan disetiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran disetiap provinsi di Indonesia. Gaji KPID Provinsi Bengkulu berasal dari dana hiba.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu. Ada beberapa bidang yang terdapat pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, diantaranya:

- a. Bidang perizinan, bidang ini memiliki tugas koordinasi dan mengawasi Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengawasi berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, mengawasi berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Bidang pengawasan isi siaran, bidang ini memiliki tugas menyusun peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran, Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran, Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- b. serta menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik,dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- c. Bidang Kelembagaan, bidang ini memiliki tugas Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI, Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan, Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Tugas dan Kewajiban dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat ke-125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”.

Masyarakat sebagai subjek dakwah (da'i) harus mampu menghindari dampak negatif media massa sebagai cara untuk menjaga kualitas pribadinya sehingga kemudian akan mampu melindungi objek dakwahnya (mad'u) dari pengaruh negatif media. Selain sebagai subjek dakwah, sehingga sudah seharusnya masyarakat memiliki konsep literasi. media yang baik dalam menghadapi tantangan pesatnya perkembangan media yang memiliki pengaruh kuat baginya.

Berikut Lembaga Penyiaran Swasta Lokal di Kota Bengkulu

LPS Lokal Kota Bengkulu
RBTv
BETv
ESA TV

Di Provinsi Bengkulu siaran radio dipancarkan dengan menggunakan Frekuensi FM. Ada 15 radio yang terpantau oleh KPID Bengkulu. Radio tersebut menyelenggarakan siarannya dengan membentuk program-program yang memberikan daya tarik bagi masyarakat, ketertarikan masyarakat juga akan membentuk kedekatan antara pendengar dan penyiar dimana pendengar dapat berkirim pesan ke pendengar lain atau sekedar memesan lagu favorit untuk diputar. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Kota Bengkulu sebai berikut :

LPS Lokal Kota Bengkulu
Swara Unib
Sehati FM
Suara Bengkulu FM
Kencana FM

Hits FM
Dehasen FM
Lestta FM
Trans FM
Santana FM
Flamboyan FM
Jazirah FM
L-Bass
Flamboyan FM
Jazirah
L-Bss

Pengawasan oleh KPID Bengkulu terhadap stasiun-stasiun televisi nasional meliputi pemantauan konten siaran, penanganan keluhan masyarakat, edukasi tentang etika penyiaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kepatuhan dalam penyiaran di wilayah Bengkulu. Berikut adalah Stasiun Tv Nasional :

Televisi Nasional
Trans 7
GTV
Trans TV
SCTV
RCTI
MNC TV
NET TV
Indosiar
Metro TV
RTV
ANTV

TV One
Kompas TV
Inews TV

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kemudian melahirkan strategi-strategi literasi media yang terus disesuaikan mengikuti tren teknologi media saat ini. Melihat kondisi Penyiaran di Bengkulu, rendahnya tingkat literasi media termasuk masalah-masalah yang muncul seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak bertanggung jawab. masih banyak konten siaran yang bermuatan kekerasan, muatan seksual dan perlindungan anak, Hal ini meneliti sejauh mana kesadaran literasi media di kalangan masyarakat Bengkulu dan seberapa besar pemahaman mereka tentang pentingnya literasi media dalam menyaring informasi yang di terima. maka perlu adanya edukasi bagi masyarakat guna menekan dampak negative dari penyiaran yang ada.

literasi media yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat aduan masyarakat terhadap siaran yang melanggar P3SPS. Salah satu indikasi masyarakat yang melek media adalah masyarakat mampu mengenali konten media yang ada serta menghindari dampak dari konten yang disiarkan.¹¹ Hal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu. Mengingat salah satu tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat mengenai siaran yang sehat, adil dan berkualitas.

Melihat kondisi Penyiaran di Bengkulu, rendahnya tingkat literasi media termasuk masalah-masalah yang muncul seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak bertanggung jawab. masih banyak konten siaran yang bermuatan kekerasan, muatan seksual dan perlindungan anak, Hal ini meneliti sejauh mana kesadaran literasi media di kalangan masyarakat Bengkulu dan seberapa besar pemahaman mereka tentang pentingnya literasi media dalam menyaring informasi yang di terima. maka perlu adanya edukasi bagi masyarakat guna menekan dampak negative dari penyiaran yang ada.

Berikut contoh konten siaran yang bermuatan kekerasan, muatan seksual dan perlindungan anak :

1. Konten siaran bermuatan kekerasan yaitu, Sinetron "Anak Langit" perkelahian antar geng motor, dalam sinetron tersebut terlibat dalam perkelahian fisik dengan menggunakan tangan kosong dan benda-benda seperti rantai dan tongkat. Penayangan adegan kekerasan dalam sinetron "Anak Langit" sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan pendidik. Mereka khawatir anak-anak dan remaja yang menonton akan terpengaruh oleh adegan-adegan kekerasan tersebut. Untuk mengurangi dampak negatif dari adegan kekerasan, stasiun televisi harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh KPID. Pembuat sinetron juga harus lebih selektif dalam menampilkan adegan kekerasan dan memastikan bahwa konten mereka memiliki pesan moral yang kuat dan mendidik.
2. Konten Siaran Mengandung Seksual yaitu, Iklan Produk Kecantikan. Menggunakan gambar atau video dengan model dalam pose-pose yang sangat seksi atau bahasa yang menyinggung daya tarik seksual untuk mempromosikan produk kecantikan. Kemudian iklan obat kuat. KPID bertujuan untuk memastikan bahwa iklan yang ditayangkan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga menghormati norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu,

iklan dengan unsur seksual sering kali perlu disesuaikan atau diatur agar tidak melanggar pedoman yang ada.

3. Konten Siaran Mengandung Perlindungan Anak yaitu, sinetron "Dari Jendela SMP." Sinetron ini mengangkat cerita tentang kehidupan remaja di sekolah menengah pertama, termasuk berbagai tantangan yang mereka hadapi seperti perundungan (bullying). Dalam sinetron ini, ditampilkan bagaimana anak-anak yang menjadi korban bullying berusaha melawan dan mendapatkan dukungan dari teman-teman, guru, serta keluarga mereka. Ceritanya menyoroti pentingnya perlindungan anak dari bullying dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa.

literasi media yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat aduan masyarakat terhadap siaran yang melanggar P3SPS. Salah satu indikasi masyarakat yang melek media adalah masyarakat mampu mengenali konten media yang ada serta menghindari dampak dari konten yang disiarkan.

Dampak penyiaran yang tidak berkualitas berakibat buruk terhadap perkembangan sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Siaran disesuaikan dengan tingkat konsumsi penonton atau pendengar. Siaran harus memperhatikan jam tayang misalnya tayangan pagi untuk kalangan anak, siang kalangan remaja, malam kalangan dewasa. Tujuan utama strategi literasi media ini tetap terfokus pada perwujudan penyiaran sehat, adil dan berkualitas di Provinsi Bengkulu. Literasi media merupakan upaya pembelajaran khalayak media dan masyarakat menggunakan media dengan cerdas. Tujuan penting literasi media ialah bagaimana mengubah paradigma yang pasif pada media massa menjadi aktif menggunakan media secara bijak. Literasi media dikembangkan bukan lagi dengan tujuan utama sebagai proteksi terhadap generasi muda, melainkan upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk dapat hidup di dunia yang sesak media..

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami yang tidak berusaha untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Jadi penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan fakta serta mengadakan perlakuan khusus terhadap data-data penelitian yang didapat.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Aktivitas yang ada dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing or verification*. (3)Reduksi Data (*Data Reduction*)Merupakan proses pemilihan, pemusatan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan selama penelitian berlangsung. Pada pelaksanaannya reduksi data dilakukan dengan menggunakan analisis internal dan eksternal yang ada di lingkup strategi literasi media yang dibangun oleh KPID Provinsi Bengkulu. (2)Penyajian Data (*Data Display*) Merupakan serangkaian informasi yang tersusun rapi dengan tujuan untuk menghasilkan tahapan

penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam tahapan didalam strategi literasi media. (3)Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*) Berdasarkan permulaan pengumpulan data, kemudian analisis kualitatif yang dimulai dengan mencari arti dari suatu hal, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang baik akan menghasilkan kesimpulan yang kompeten tergantung pada hasil pencatatan data lapangan serta analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPID Provinsi Bengkulu merupakan lembaga yang di bentuk diProvinsi Bengkulu untuk mengawasi penyiaran di daerah Bengkulu.KPID Provinsi Bengkulu Terletak di Jl. Indragiri, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu .KPID Provinsi Bnegkulu didiran pada tahun 2006. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Povinsi Bengkulu menjalankan amanah UU penyiaran dengan membuat program kegiatan yang berorientasi pada proses pembinaan ke masyarakat, apakah kepada masyarakat umum maupun masyarakat penyiaran.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tersebut tentang penyiaran, KPI/KPID diamanahkan tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak hak dan asasi manusia,dengan pasal tersebut KPI/KPID tidak sekedar menjamin pemerataan informasi kepada masyarakat tetapi juga menjamin mutu dan kualitas informasi yang di sampaikan kepada masyarakat harus layak dan benar. pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll.

Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai

kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

Komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu memiliki team pemantauan yang sangat penting dalam isi siaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa team pemantau isi siaran sangat penting :

1. pemantauan Konten Siaran: TPIS melakukan pemantauan terhadap konten-konten yang disiarkan oleh stasiun televisi dan radio di wilayah Bengkulu. Mereka mengawasi apakah konten tersebut sesuai dengan kode etik penyiaran, regulasi yang berlaku, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Bengkulu.
2. Evaluasi Kualitas Program: TPIS mengevaluasi kualitas program-program siaran, termasuk aspek keberagaman, keadilan, dan keseimbangan dalam liputan berita serta konten-konten hiburan dan informasi lainnya.
3. Penanganan Keluhan Masyarakat: TPIS menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait isi siaran. Mereka memberikan respons yang tepat dan melakukan investigasi jika diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
4. Sosialisasi Kode Etik dan Regulasi: TPIS memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penyelenggara penyiaran dan masyarakat tentang kode etik penyiaran yang berlaku, serta regulasi-regulasi yang harus dipatuhi dalam produksi dan penyiaran program siaran.

5. **Monitoring Kepatuhan:** TPIS mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan KPID Bengkulu terkait penyiaran. Mereka memastikan bahwa stasiun-stasiun penyiaran mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, seperti batasan waktu siaran, perlindungan anak-anak, dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan.
6. **Pelaporan dan Rekomendasi:** TPIS menyusun laporan hasil pemantauan dan memberikan rekomendasi kepada KPID Bengkulu terkait peningkatan kualitas dan kepatuhan isi siaran. Laporan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut terkait pengawasan dan pembinaan penyiaran di wilayah tersebut.
7. **Pengawasan Konten Sensitif:** TPIS mengawasi konten-konten yang bersifat sensitif, seperti kekerasan, seksualitas, serta konten yang dapat merugikan moral dan nilai-nilai sosial masyarakat Bengkulu. Mereka berperan dalam memastikan bahwa konten-konten tersebut tidak ditampilkan secara berlebihan atau tidak pantas.

Dengan menjalankan tugas-tugas ini, TPIS KPID Bengkulu berperan penting dalam menjaga integritas penyiaran dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten yang tidak sesuai atau merugikan. Tugas-tugas ini juga mendukung terciptanya penyiaran yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu.

**STRUKTUR LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA ABDA ERAH (KPID) BENGKULU PERIODE 29 FEBRUARI 2024- 25 APRIL 2025**

Dasar Keputusan Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Bengkulu
Tanggal 28 Februari 2024 dan Rapat Kerja Komisioner KPID, Provinsi Bengkulu Tanggal 04 Maret
2024

Komisioner KPID Bengkulu	
Ketua	: Albertce Rolando Thomas, S.Sos
Wakil Ketua	: Fonika Thoyib, S.Sos., M.I.Kom
Korbid PIS	: Hadislani, SH., M.Pd
Korbid Kelembagaan	: Indah Budiyanti, ST
Korbid PKSP	: Novi Luciana, SP
Anggota	: 1. Drs. Gusmian, M.Pd 2. Albertce Rolando Thomas, S.Sos

Keuangan	
Staff	: 1. Desi Maryani, S.Kom 2. Lindah Anggraini, S.TP

Sekretariat	
PLT Sekretariat	: Alan Fofi, SH
Staff	: Aprima Adi Saputra, S.Kom
Staff Media	: David Efendi
Repsesionis	: 1. Yos Ari Wijayanti, S.E 2. Revi Olvanadia, S.IP
Driver	: Yos Ari Wijaya, S.E
Scurity	: 1. Dori Yuniasyah 2. Wico Satria
Cleaning Service	: Rahmansyah

Pemantau Isi Siaran dan Radio	
Analisis Pemantau Siaran Radio	Dodi Yuliandri, SE
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Alan Fofi, S.H
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Agoes Sanjaya, SE
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Angga Rolista P.S.Pd.i
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Aprima Adi Putra, S.Kom
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Deasi Maryani, S.Kom
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Nike Karlina
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Jeky Kusmiran, S.Kom
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Vence Daniel, S.I.Kom
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Wiwin Fauzi, SE
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Maharani Tara Putri
Pemantau Siaran Tv dan Radio	David Efendi
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Revi Olvanadia, S.IP
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Desi Wahyuningsih, S.Si
Pemantau Siaran Tv dan Radio	Revo

Dalam bahasan hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yang mana bentuk penelitiannya yaitu menggunakan pedoman wawancara kemudian bertanya langsung kepada Ketua Kpid Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua, Koordinasi Bidang Pengawasan dan Bidang Kelembagaan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 April 2024 pada jam 10.30 WIB. untuk mengetahui bagaimana Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu Dalam Mensosialisasikan Literasi Media Untuk Mewujudkan Penyiaran Sehat.

Table; 1
Data Informan

No	Nama	Sebagai	Suku	Umur
1	Albertce Rolando Thomas, S.Sos	Ketua KPID	Bengkulu Asli	35
2	Fonika Thoyib, S.Sos., M.I.Kom	Wakil Ketua KPID	Serawai	52
3	Hadislani, SH., M.Pd	Kordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran	Rejang	63
4	Indah Budiyaniti, ST	Bidang Kelembagaan	Melayu	44

Dengan data informan diatas peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu Dalam Mensosialisasikan Literasi Media Untuk Mewujudkan Penyiaran Sehat. Berikut Hasil Wawancara Dengan Wakil Ketua Kpid Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua, Koordinasi Bidang Pengawasan dan Bidang Kelembagaan.

1. bagaimana Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu Dalam Mensosialisasikan Literasi Media Untuk Mewujudkan Penyiaran Sehat ?

Jawaban dari bapak Albertce Rolando Thomas, S.Sos, “Strategi yang dilakukan kami yaitu:

1. Edukasi masyarakat (Sosialisasi), melakukan sosialisasi edukasi langsung kelapangan kepada masyarakat terutama pada pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Serta Perguruan Tinggi, bagaimana mengenali informasi yang valid, dan cara mengonsumsi media secara kritis serta bijak dalam bemedi.
2. Kolaborasi dengan pendidikan, Bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program literasi media di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi guna mengajarkan generasi muda tentang literasi sejak dini.
3. Penguatan Kode Etik, memperkuat penerapan dan pengawasanterhadap kode etik penyiaran, termasuk sanksi bagi pelanggaran yang merugikan kepentingan public dan norma-norma moral.
4. Workshop dan pelatihan, mengadakan workshop dan pelatihan secara rutin kepada penyiaran dan masyarakat umum tentang literasi media, termasuk bagaimana mengenali informasi yang valid dan bertanggung jawab.
5. Penyediaan materi edukasi, menyidiakan materi edukasi tentang literasi media dalam format yang mudah diakses dan dipahami.
6. Bekerja sama dengan stakeholder, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pemerintahan dan meia massa untuk meningkatkan efektivitas program literasi media.

Dengan mengimplementasikan startegi-strategi tersebut, KPID Provinsi Bengkulu dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia pendidikan akan literasi media, sehingga mendorong praktik penyiaran yang lebih sehat dan bertanggung jawab”.

2. Apa yang mendorong KPID Provinsi Bengkulu untuk focus pada literasi media sebagai strategi untuk mencapai penyiaran yang sehat ?

Jawaban dari bapak Albertce Rolando Thomas, S.Sos , “KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) provinsi Bengkulu memiliki beberapa alasan untuk fokus pada literasi media sebagai strategi utama dalam mencapai penyiaran sehat. Beberapa faktor yang mendorong langkah ini meliputi:

1. Tingkat Konsumsi Media yang Tinggi: Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aksesibilitas internet, masyarakat semakin banyak mengonsumsi konten dari berbagai platform media. Literasi media menjadi penting untuk membantu masyarakat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten yang mereka konsumsi.
2. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat: Hoaks dan informasi palsu menjadi tantangan besar dalam era digital. Dengan meningkatkan literasi media, KPID Bengkulu berupaya membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengenali dan menyaring informasi yang tidak benar.
3. Perlindungan terhadap Pengaruh Negatif Media: Media bisa membawa dampak positif maupun negatif. Konten yang tidak sesuai, seperti kekerasan, pornografi, atau propaganda, dapat berdampak buruk pada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Literasi media membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk lebih kritis terhadap konten yang mereka terima.
4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Literasi media mendukung upaya regulasi dan kebijakan yang lebih efektif. Masyarakat yang paham literasi media cenderung mendukung kebijakan penyiaran yang sehat dan mampu berpartisipasi dalam proses pengawasan penyiaran.
5. peningkatan Kualitas Konten Lokal: Dengan literasi media, masyarakat dapat memberikan umpan balik yang lebih berkualitas kepada penyedia konten. Ini bisa mendorong media lokal untuk memproduksi konten yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai lokal.

Fokus pada literasi media oleh KPID Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi dan memproduksi konten media secara bijak dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya lingkungan penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi semua pihak”.

3. Bagaimana KPID provinsi bengkulu menilai tingkat literasi media di masyarakat bengkulu dan apakah ada tantangan khusus yang di hadapi dalam konteks ini?

Jawaban dari ibu Fonika Thoyib, S.Sos., M.I.Kom, “KPID Provinsi Bengkulu melakukan berbagai upaya untuk menilai tingkat literasi media di masyarakat Bengkulu dan menghadapi sejumlah tantangan dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa metode penilaian dan tantangan yang dihadapi:

1. kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Bekerjasama dengan sekolah dan universitas untuk mengukur literasi media di kalangan siswa dan mahasiswa. Ini bisa dilakukan melalui program-program edukasi dan evaluasi terkait literasi media.
2. Monitoring Media: KPID juga memantau konten yang disiarkan oleh media lokal dan menilai respons serta kritik dari masyarakat terhadap konten tersebut. Ini membantu dalam memahami sejauh mana masyarakat dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka terima.
3. Workshop dan Seminar: Dengan mengadakan workshop dan seminar tentang literasi media, KPID dapat mengukur partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi dari kegiatan ini juga memberikan gambaran tentang tingkat literasi media.

Kemudian ada beberapa Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Media yaitu:

1. Tingkat Pendidikan yang Beragam: Variasi tingkat pendidikan di masyarakat menyebabkan perbedaan dalam kemampuan memahami dan menganalisis konten media. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mungkin lebih rentan terhadap hoaks dan informasi yang menyesatkan.
2. Budaya dan Kebiasaan: Kebiasaan mengonsumsi media tanpa kritik dan budaya menerima informasi tanpa verifikasi menjadi tantangan tersendiri. Mengubah mindset ini memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan.
3. Kompleksitas Informasi Digital: Dalam era digital, informasi sangat cepat berubah dan kompleks. Menjaga masyarakat agar selalu up-to-date dengan pengetahuan literasi media yang relevan merupakan tantangan besar.

Itulah cara yang kita lakukan untuk menilai tingkat literasi media serta tantangan yang sering kita hadapi.”

4. apa saja langkah konkret yang telah di ambil oleh kpip provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan literasi media kepada masyarakat serta anak sekolah?

Jawaban dari ibu Fonika Thoyib, S.Sos., M.I.Kom, “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mensosialisasikan literasi media kepada masyarakat dan anak sekolah. Beberapa langkah tersebut meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi di Sekolah: KPID Bengkulu mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di sekolah-sekolah. Ini melibatkan presentasi dan diskusi tentang pentingnya literasi media, cara mengidentifikasi informasi yang akurat, dan dampak negatif dari informasi yang tidak benar.
2. Program Radio dan TV Edukatif: Menyelenggarakan program radio dan televisi yang fokus pada literasi media. Program ini melibatkan narasumber ahli yang membahas topik-topik terkait dan memberikan tips praktis untuk mengonsumsi media secara bijak.
3. Kerjasama dengan Media Lokal: KPID Bengkulu bekerja sama dengan media lokal untuk menyiarkan program-program yang mengedukasi masyarakat tentang literasi media. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Hal-hal itu menunjukkan komitmen KPID Bengkulu dalam meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat dan anak sekolah, serta mendorong penggunaan media yang lebih sehat dan bertanggung jawab”.

5. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh kpip provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan literasi media untuk mewujudkan penyiaran sehat, bagaimana upaya mrngatasinya?

Jawaban dari ibu Fonika Thoyib, S.Sos., “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu menghadapi beberapa kendala dalam mensosialisasikan literasi media untuk mewujudkan penyiaran sehat. Berikut adalah beberapa kendala utama beserta upaya untuk mengatasinya:

1. Minimnya Kesadaran Masyarakat: Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya literasi media dan masih kurang kritis dalam mengonsumsi informasi dari media.
2. Perlawanan dari Konten Negatif: Penyebaran konten negatif seperti hoaks dan informasi yang tidak akurat seringkali lebih cepat dan luas dibandingkan dengan upaya literasi media.
3. Keragaman Bahasa dan Budaya: Perbedaan bahasa dan budaya di berbagai daerah di Bengkulu bisa menjadi tantangan dalam menyampaikan pesan literasi media yang efektif.

4. Perlawanan dari Konten Negatif: Penyebaran konten negatif seperti hoaks dan informasi yang tidak akurat seringkali lebih cepat dan luas dibandingkan dengan upaya literasi media.

Kemudian bagaimana cara kami mengatasinya yakni dengan :

1. Program Edukasi Berkelanjutan: Mengembangkan program edukasi berkelanjutan yang dirancang untuk berbagai kelompok usia dan latar belakang. Ini bisa berupa kurikulum khusus di sekolah atau program pelatihan bagi komunitas.
2. penyuluhan dan Edukasi Intensif: Melakukan penyuluhan dan edukasi secara langsung melalui seminar, lokakarya, dan diskusi di komunitas serta sekolah-sekolah. Meningkatkan frekuensi dan intensitas kegiatan ini untuk menjangkau lebih banyak orang.
3. Penggunaan Bahasa Daerah: Menyusun materi literasi media dalam berbagai bahasa daerah yang digunakan di Bengkulu untuk memastikan pesan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
4. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konten media yang disiarkan, serta bekerja sama dengan platform media untuk mengurangi penyebaran konten negatif.

dengan mengidentifikasi kendala-kendala ini dan melaksanakan upaya-upaya strategis untuk mengatasinya, KPID Bengkulu dapat lebih efektif dalam mensosialisasikan literasi media dan mewujudkan penyiaran yang sehat”.

6. Bagaimana proses pengawasan isi siaran dilakukan oleh KPID, terutama dalam hal penetapan standar konten dan evaluasi kepatuhan penyiaran?

Jawaban dari bapak Hadislani, SH., M.Pd., “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu, seperti KPID di provinsi lainnya di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur isi siaran untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana proses pengawasan isi siaran dilakukan oleh KPID Provinsi Bengkulu, terutama dalam hal penetapan standar konten dan evaluasi kepatuhan penyiaran:

Penetapan Standar Konten yakni:

1. KPID Bengkulu mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti etika penyiaran, perlindungan terhadap anak, konten dewasa, dan lain-lain.konten yang tidak diperbolehkan Menjadi konsentrasi.pornografi,kekerasan,perkelahian, menghina suku agama dan seksual.
2. Sosialisasi,KPID Bengkulu secara berkala melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan standar konten kepada lembaga penyiaran (televisi dan radio) di wilayahnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyiaran memahami dan menerapkan standar tersebut.

Kemudian pengawasan isi siaran yakni :

1. Pemantauan Siaran: KPID Bengkulu melakukan pemantauan rutin terhadap isi siaran lembaga penyiaran di wilayahnya. Pemantauan ini bisa dilakukan melalui monitoring langsung atau menggunakan alat bantu teknologi untuk merekam dan menganalisis konten siaran. KPID Provinsi Bengkulu memiliki team pemantauan ada 15 orang team pemantauan, kemudian memiliki alat reqord khusus tv lokal RBTv, BE TV, TVRI dan ESA TV Bengkulu dan didukung dengan reqord melalui CCTV, dan ada 8 televisi yang akan bergantian disesuai kebutuhan pemantauan.

2. Analisis dan Evaluasi: Konten siaran yang dipantau kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk menilai kepatuhan terhadap P3 dan SPS. KPID dapat menggunakan indikator-indikator tertentu untuk menentukan apakah suatu konten melanggar peraturan atau tidak”.
7. Bagaimana KPID Provinsi Bengkulu menangani konten-konten yang dianggap kontroversial atau melanggar standar moral dan etika dalam siaran televisi dan radio?

Jawaban dari bapak Hadislani, SH., M.Pd., “KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam mengawasi konten yang disiarkan di televisi dan radio di wilayahnya. Mereka mengatur konten-konten yang dianggap kontroversial atau melanggar standar moral dan etika melalui beberapa hal yakni :

1. Penyusunan Pedoman Penyiaran: KPID Provinsi Bengkulu menyusun pedoman penyiaran yang mengatur tentang standar moral dan etika yang harus dipatuhi oleh stasiun televisi dan radio di wilayah tersebut. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai konten yang disiarkan.
 2. pemantauan dan Evaluasi Konten: KPID secara teratur memantau siaran televisi dan radio untuk menilai konten-konten yang disiarkan. Mereka melakukan evaluasi terhadap konten-konten yang dianggap kontroversial atau melanggar standar yang telah ditetapkan. seperti pornografi, konten kekerasan, perkelahian, menghina suku ras dan kontek seksual.
 3. Memberikan Rekomendasi dan Sanksi: Jika terdapat konten yang dianggap melanggar pedoman penyiaran, KPID Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada stasiun penyiaran untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Mereka juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada stasiun penyiaran yang terbukti melanggar aturan, seperti teguran tertulis, denda, atau bahkan pencabutan izin penyiaran dalam kasus-kasus yang serius”.
8. Apa peran teknologi dalam memfasilitasi pengawasan isi siaran oleh KPID, termasuk alat atau sistem yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi konten siaran?

Jawaban dari bapak Hadislani, SH., M.Pd., “Teknologi memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pengawasan isi siaran oleh KPID, termasuk dalam hal memantau dan mengevaluasi konten siaran. Berikut beberapa teknologi dan sistem yang umum digunakan:

1. Monitoring Otomatis (Automatic Content Recognition, ACR): ACR adalah teknologi yang memungkinkan identifikasi konten televisi atau radio secara otomatis berdasarkan ciri-ciri unik dari siaran tersebut, seperti audio, gambar, atau teks tertentu. Dengan ACR, KPID dapat secara efisien memantau banyak saluran siaran secara real-time untuk mengidentifikasi konten yang mungkin melanggar pedoman penyiaran.
2. Software Pemantauan Konten: Terdapat perangkat lunak khusus yang dirancang untuk menganalisis konten siaran berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam pedoman penyiaran. Perangkat lunak ini dapat membantu dalam menangkap dan mengevaluasi konten-konten yang sensitif atau kontroversial.
3. Database dan Sistem Manajemen Konten: KPID biasanya memiliki sistem basis data yang mencatat semua siaran yang disiarkan oleh stasiun-stasiun penyiaran di wilayahnya. Sistem ini membantu dalam melacak riwayat siaran, memungkinkan untuk menelusuri konten tertentu yang menjadi subjek evaluasi atau pengawasan.
4. Peralatan Pemantauan Jarak Jauh: Untuk memantau siaran dari berbagai lokasi secara efektif, KPID dapat menggunakan peralatan pemantauan jarak jauh yang terhubung secara langsung dengan stasiun-stasiun penyiaran. Peralatan ini bisa termasuk sistem streaming langsung atau jaringan terpadu untuk memantau siaran secara real-time.
5. Alat Analisis Sentimen dan Klasifikasi Konten: Untuk mengidentifikasi konten yang melanggar standar moral atau etika, KPID dapat menggunakan alat analisis sentimen yang memeriksa respons publik terhadap siaran tertentu. Selain itu, alat klasifikasi konten juga

membantu dalam mengategorikan siaran berdasarkan jenis konten atau potensi risiko melanggar aturan.

Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini, KPID dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap konten siaran, memastikan bahwa stasiun-stasiun penyiaran mematuhi pedoman dan standar yang telah ditetapkan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif konten yang tidak sesuai atau tidak pantas disiarkan”.

9. Bagaimana kerja sama antara KPID Provinsi Bengkulu dengan Lembaga atau pihak lain dalam upaya mensosialisasikan literasi media ?

Jawaban dari ibu Indah Budiyan, ST., “Kerja sama antara KPID Provinsi Bengkulu dengan lembaga atau pihak lain dalam upaya mensosialisasikan literasi media dapat dilakukan melalui:

1. Kerja Sama dengan Pendidikan dan Sekolah: KPID dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-program literasi media. Ini dapat mencakup penyuluhan tentang penggunaan media yang bijak, pengenalan tentang bagaimana media bekerja, dan pentingnya kritis dalam menerima informasi.
2. Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah Lain: KPID bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengintegrasikan literasi media dalam program-program mereka. Misalnya, mengadakan seminar atau workshop bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Kerja Sama dengan Media Massa: KPID dapat bermitra dengan stasiun televisi, radio, atau surat kabar lokal untuk menyuarakan pesan-pesan literasi media melalui program-program edukasi atau kampanye sosial. Hal ini dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Bengkulu tentang pentingnya literasi media.
4. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil: Menggandeng organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan pendidikan dan media untuk bersama-sama mengembangkan dan menyebarkan materi-materi literasi media. Organisasi ini dapat membantu dalam mencapai target audiens yang lebih spesifik, seperti remaja atau orang tua.

Dengan membangun kerja sama yang solid dengan berbagai lembaga dan pihak, KPID Provinsi Bengkulu dapat mengintensifkan upaya dalam mensosialisasikan literasi media. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperluas jangkauan pesan-pesan literasi media, tetapi juga memperkuat pengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat termasuk anak-anak muda penerus bangsa dalam menggunakan media dengan bijak dan bertanggung jawab”.

10. Bagaimana KPID Provinsi Bengkulu melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan dan implementasi strategi literasi media untuk penyiaran sehat?

Jawaban dari ibu Indah Budiyan, ST., “KPID Provinsi Bengkulu dapat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan dan implementasi strategi literasi media untuk penyiaran sehat yakni:

1. Forum Konsultasi dan Diskusi: KPID dapat mengadakan forum konsultasi secara rutin dengan berbagai pemangku kepentingan seperti stasiun televisi dan radio lokal, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas media. Forum ini menjadi wadah untuk berbagi informasi, mendengarkan masukan, dan merumuskan strategi bersama untuk meningkatkan literasi media di Bengkulu.
2. Partisipasi dalam Perencanaan Program: KPID dapat mengundang pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan program-program literasi media. Misalnya,

melibatkan stasiun televisi dan radio dalam menyusun konten-konten edukasi tentang literasi media yang akan disiarkan kepada masyarakat serta anak-anak sekolah dan perguruan tinggi.

3. Evaluasi dan Umpan Balik Bersama: KPID dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi program literasi media yang telah dilaksanakan. Melalui sesi umpan balik bersama, KPID dapat mengetahui efektivitas program serta mendapatkan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.
4. Pengembangan Materi Edukasi Bersama: Kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau akademisi untuk mengembangkan materi edukasi tentang literasi media yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi Bengkulu.

Dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dari awal perencanaan hingga implementasi strategi literasi media, KPID Provinsi Bengkulu dapat memastikan bahwa program-program yang disusun dapat lebih relevan, efektif, dan berdampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media yang sehat dan bertanggung jawab”.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua, Koordinasi Bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Bidang Kelembagaan. Tentang Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu Dalam Mensosialisasikan Literasi Media Untuk Mewujudkan Penyiaran Sehat. Sebagaimana telah dipaparkan pada hasil temuan peneliti, maka peneliti akan membahas hasil temuan dan wawancara peneliti dengan Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua, Koordinasi Bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Bidang Kelembagaan.

1. Penelitian

Dari observasi dan wawancara peneliti menjelaskan bahwa pentingnya literasi media dalam konteks penyiaran. Pemahaman yang Mendalam, Literasi media memungkinkan individu untuk memahami berbagai jenis media dengan lebih dalam. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana media bekerja, bagaimana pesan disampaikan, siapa yang mengontrol informasi, dan bagaimana media memengaruhi pandangan dunia kita. Bagaimana kita Pemilihan Konten yang Tepat. Dalam era informasi yang berlimpah, literasi media membantu individu untuk kritis dalam memilih dan mengevaluasi konten yang mereka konsumsi.

Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu (hoax), bias informasi, atau manipulasi dalam penyajian informasi. Partisipasi Publik yang Aktif, Literasi media mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses komunikasi dan penyiaran. Individu yang memiliki literasi media yang baik cenderung lebih mampu berkontribusi dalam diskusi publik, mempengaruhi opini, dan memahami implikasi dari pesan yang mereka terima. Perlindungan terhadap Dampak Negatif, dengan literasi media yang baik, masyarakat lebih mampu melindungi diri dari dampak negatif media, seperti konsumsi konten yang tidak sehat secara emosional atau psikologis, serta meminimalkan risiko penyebaran informasi yang salah atau merugikan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran. Lembaga ini bersifat independen dan berada di tingkat nasional. Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) adalah melakukan pengawasan agar program televisi makin berkualitas.

Komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu memiliki tugas yang penting dalam mengawasi siaran yang ada di Kota Bengkulu dalam hal ini Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu memiliki team yang bertugas memantau isi siaran. Team pemantau isi siaran pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu berjumlah 16 orang team pemantau isi siaran. Tujuan dari team pemantau ini yaitu untuk melihat bagaimana dampak dari penyiaran yang dilakukan oleh berbagai media.

Hal yang menjadi bahan pengawasan siaran ini juga tidak lepas dari P3SPS dimana ada beberapa aspek pengawasan dari sisi isi siaran. Berikut aspek terpenting yang harus diawasi:

1. Perlindungan Kepada Anak
2. Perlindungan Kepada Orang Dan Kelompok Masyarakat Tertentu
3. Muatan Seksual
4. Muatan Kekerasan
5. Muatan Program Siaran Terkait Rokok, Napza (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif), Dan Minuman Beralkohol
6. Muatan Program Siaran Terkait Perjudian
7. Muatan Mistik Dan Supranatural

Di Dalam pengawasan, KPID juga dibekali beberapa sanksi yan dapat diberika kepada Radio, Televisi dan TV kabel. Didalam P3SPS terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan kepada lembaga penyiaran. Berikut beberapa sanksi yan ada didalam P3SPS:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran
4. Denda administrative
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

1. Perumusan Strategi dan Perencanaan

Melihat pentingnya kegiatan literasi media tersebut. Perlu perencanaan yang matang didalam sebuah kegiatan literasi media. Perencanaan yang cakap, dapat menciptakan sebuah kegiatan yang berkualitas dan intinya akan tepat sasaran. Perencanaan mencakup dari jenis kegiatan, sasaran kegiatan, lokasi kegiatan, orang-orang yang akan terlibat didalam kegiatan hingga anggaran yang dibutuhkan. Pelaksanaan program yang didasarkan pada perencanaan yang baik sebenarnya bukan hanya memungkinkan mencapai orang-orang yang tepat atau tujuan yang diharapkan, tapi lebih dari itu membuat sebuah tindakan yang dilakukan lebih sistematis, terarah dan antisipatif.

Membangun Warga Negara yang Bertanggung Jawab, literasi media juga berkontribusi dalam pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Individu yang memiliki literasi media yang tinggi cenderung lebih kritis terhadap informasi politik, sosial, dan ekonomi, serta lebih mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang bijak dan informasi. Peningkatan Profesionalisme dalam Penyiaran, Bagi mereka yang bekerja di industri penyiaran, literasi media sangat penting untuk memahami kode etik, standar penyiaran, dan tanggung jawab sosial dalam menyajikan informasi kepada publik dengan akurat dan seimbang. Secara keseluruhan, literasi media bukan hanya tentang kemampuan teknis untuk menggunakan media, tetapi juga tentang kemampuan kritis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, dan berpartisipasi dalam ekosistem media modern. Hal ini tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga penting dalam membangun masyarakat yang informasional dan demokratis.

Dalam melakukan penyusunan perencanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu membuat 3 konsep yang menjadi fundamental dari perencanaan yaitu :

1. Menentukan Khalayak

Menentukan khalayak Ini mencakup identifikasi dan pemahaman terhadap siapa target audiens atau khalayak yang ingin dijangkau oleh KPID Provinsi Bengkulu. Menentukan khalayak berarti memahami siapa yang akan menerima informasi atau pesan yang disampaikan. Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik dan preferensi khalayak ini penting untuk menyesuaikan program dan konten siaran agar relevan dan efektif. Dengan memahami khalayak, KPID dapat menyusun program yang relevan dan menarik bagi mereka, memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik.

2. Menetapkan Metode Penyampaian

Metode penyampaian adalah cara atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Ini bisa berupa siaran televisi, radio, media sosial, website, atau bentuk media lainnya. Pemilihan metode penyampaian bergantung pada karakteristik khalayak dan jenis informasi yang akan disampaikan. Misalnya, untuk khalayak yang lebih muda, media sosial mungkin lebih efektif, sementara untuk khalayak yang lebih tua, radio atau televisi mungkin lebih cocok. Metode penyampaian yang tepat akan memastikan pesan dapat diakses dan dipahami oleh khalayak dengan maksimal. Konsep ini berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan berbagai metode atau platform untuk menyampaikan program siaran kepada khalayak. Hal ini mencakup pemilihan media penyiaran, teknologi yang digunakan, serta strategi distribusi konten agar dapat mencapai khalayak dengan efektif.

3. Menetapkan Metode Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang memberikan informasi atau menjadi referensi dalam program penyiaran. Memilih narasumber yang tepat sangat penting untuk kredibilitas dan kepercayaan informasi yang disampaikan. Narasumber harus memiliki keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan topik yang dibahas, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. KPID Bengkulu perlu memastikan narasumber adalah orang yang diakui dan dihormati dalam bidangnya agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh khalayak.

Dengan menerapkan ketiga konsep ini, KPID Provinsi Bengkulu dapat menyusun program penyiaran yang efektif, relevan, dan kredibel bagi masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu memerlukan strategi dalam Mensosialisasikan Literasi Media Untuk mewujudkan penyiaran Sehat. Berikut strategi Komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam Mensosialisasikan Literasi Media untuk Mewujudkan Penyiaran Sehat :

1. Edukasi masyarakat (Sosialisasi), melakukan sosialisasi edukasi langsung kelapangan kepada masyarakat terutama pada pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Serta Perguruan Tinggi, bagaimana mengenali informasi yang valid, dan cara mengonsumsi media secara kritis serta bijak dalam bemedi.
2. Kolaborasi dengan pendidikan, Bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program literasi media di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi guna mengajarkan generasi muda tentang literasi sejak dini.
3. Penguatan Kode Etik, memperkuat penerapan dan pengawasan terhadap kode etik penyiaran, termasuk sanksi bagi pelanggaran yang merugikan kepentingan public dan norma-norma moral.
4. Workshop dan pelatihan, mengadakan workshop dan pelatihan secara rutin kepada penyiaran dan masyarakat umum tentang literasi media, termasuk bagaimana mengenali informasi yang valid dan bertanggung jawab.

5. Penyediaan materi edukasi, menyediakan materi edukasi tentang literasi media dalam format yang mudah diakses dan dipahami.

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran komisi penyiaran Indonesia daerah Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan visi yang dimaksud, merupakan kewajiban bagi komisi penyiaran Indonesia daerah Bengkulu diharapkan kontribusi upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran.

Instansi yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini KPID Riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan bidang penyiaran di pemerintah provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang penyiaran. “Terwujud Sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas di provinsi Bengkulu”

Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu

Makna Yang Terkandung Dalam Rumusan Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu diatas adalah sebagai berikut:

1. Sehat merupakan gambaran target yang ingin di capai adalah berharap Lembaga Penyiaran patuh dan taat terhadap peraturan soal perizinan, transparan atas data perizinan lembaga penyiaran, dukungan atas layanan yang prima demi terciptanya industri penyiaran yang sehat, dan prioritas, lembaga penyiaran publik (LPP) lokal atau Radio dan Televisi Pemerintah Daerah.
 2. Adil dalam artian berupaya menciptakan sistim yang inovatif dan kreatif serta followup masyarakat kepada KPID Provinsi Bengkulu, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyiaran.
 3. Berkualitas dalam konsep komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Provinsi Bengkulu melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan isi siaran, membangun kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang handal dan profesional dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang penyiaran yang professional.
2. Implementasi Strategi atau pelaksanaan
pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu tentang Literasi media dilakukan dalam bentuk pelaksanaan yaitu, pelaksanaan langsung bentuk kegiatannya literasi media, dan P3SPS.
 1. Pelaksanaan Langsung
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi media. Literasi media mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai media dengan kritis dan efektif. KPID Bengkulu mungkin menyelenggarakan workshop, seminar, atau sesi pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan literasi media. Contoh kegiatan termasuk diskusi tentang bagaimana mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya, cara mengenali bias media, dan strategi untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks.
 2. Pelaksanaan P3SPS

Kegiatan ini dapat meliputi tentang teknik penyiaran, pembuatan konten media yang bermutu, dan etika dalam penyiaran. Melalui pelaksanaan P3SPS, KPID Bengkulu dapat membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawab sebagai pengguna media serta sebagai pembuat konten lokal yang beretika.

3. Evaluasi Strategi

Beberapa Program literasi media yang dilakukan KPID Bengkulu memerlukan adanya evaluasi guna meningkatkan kualitas dari kegiatan program tersebut. Evaluasi perlu dilakukan guna melihat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari evaluasi diharapkan adanya masukan berupa hasil penilaian dan saran yang dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan berjalannya kegiatan literasi media. Dengan adanya evaluasi terhadap literasi media diharapkan adanya perubahan berupa kualitas masyarakat dalam memilih siaran, melakukan proteksi diri atas apa yang akan ditonton, melakukan pengaduan kepada KPID serta memberikan informasi terkait siaran yang buruk kepada KPID Bengkulu. Proses evaluasi terhadap rangkaian perencanaan program hingga dampak terhadap peserta kegiatan yang diadakan oleh KPID Bengkulu. Kegiatan literasi media dimaksudkan agar tumbuhnya budaya masyarakat termasuk anak-anak sekolah yang cerdas bermedia.

Evaluasi program literasi media dalam praktiknya ini dengan melihat sejauh mana pemahaman peserta yang dalam hal ini adalah anak-anak sekolah, rekan media maupun lembaga penyiaran. Perilaku peserta perlu dipantau untuk mengetahui apakah program literasi media untuk mewujudkan penyiaran sehat ini berhasil atau tidak. Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya karena kondisi lingkungan organisasi.

Pengawasan kegiatan literasi yang dilakukan oleh seluruh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu dalam rapat pleno. Selain mengevaluasi tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu secara keseluruhan, dalam rapat pleno ini tentu membahas tentang bagaimana mekanisme sosialisasi literasi media yang sudah dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Provinsi Bengkulu.



Gambar 1 : wawancara dengan bapak Albertce Rolando Thomas, S.Sos (Ketua KPID Provinsi Bengkulu)



Gambar 2 : wawancara dengan ibu Fonika Thoyib, S.Sos ., M.I.Kom (Wakil Ketua KPID Provinsi Bengkulu)



Gambar 3 : wawancara dengan bapak Hadislani, SH., M.Pd (Korbid PIS)



Gambar 4 : wawancara dengan ibu Indah Budiyantri, ST (Bidang Kelembagaan)



Gambar 5 : Kegiatan sosialisasi literasi media untuk mewujudkan penyiaran sehat kota Bengkulu



Gambar 6 : Kegiatan sosialisasi literasi media untuk mewujudkan penyiaran sehat kota Bengkulu



Gambar 7 : Raih rekor muri sosialisasi literasi media dengan audiens 15 ribu lebih dalam satu waktu



Gambar 8 : Raih rekor muri sosialisasi literasi media dengan audiens 15 ribu lebih dalam satu waktu



Gambar 9 : ruangan bidang pengawasan isi siaran



Gambar 10 : ruangan bidang pengawasan isi siaran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Mennsosialisasi Literasi Media Dalam Mewujudkan Penyiaran Sehat Pada KPID Provinsi Bengkulu , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan sosialisasi literasi media dalam mewujudkan penyiaran sehat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu memiliki tim riset, 15 orang team pentau isi siaran, dengan tujuan untuk melihat bagaimana dampak dari penyiaran yang dilakukan oleh berbagai media terhadap masyarakat.
- Dalam melakukan penyusunan perencanaan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu membuat 3 konsep yang menjadi fundamental dari perencanaan yaitu, menentukan khalayak, menetapkan metode penyampaian dan menentukan narasumber.
- Adapun pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu tentang Literasi media dilakukan dalam bentuk pelaksanaan yaitu, pelaksanaan langsung bentuk kegiatannya literasi media, dan Pelaksanaan P3SPS.
- Evaluasi yaitu Pengawasan kegiatan literasi yang dilakukan oleh seluruh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu dalam rapat pleno rutin. Selain mengevaluasi tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu secara keseluruhan, dalam rapat pleno ini tentu membahas tentang bagaimana mekanisme sosialisasi literasi media yang sudah dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Baksin, A. (2006). *Jurnalistik Televisi Teori Dan Praktik*, Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Eadie, W. F. (2009). *21st Century Communication: A Reference Handbook*. Sage Publications.
- Effendy, O. U. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Teori Dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. In Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Darwanto. (2007). *Televisi Sebagai Media Pendidikan*. Pustaka Pelajar.

Jurnal :

- Azmi, N. (2014). Dampak media televisi terhadap perilaku sosial anak. *Scientiae Educatia*, 3(2), 11-28.
- Baran, B., & Cagiltay, K. (2010). Motivators And Barriers In The Development Of Online Communities Of Practice. *Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research*, 39, 79-96.
- Bittner, J. R., Stevens, J. D., Garcia, H. D., Simora, F., Lane, M., Rogers, T. F., & Friedman, N. S. (1980). *General Communications*. Taylor & Francis.
- Desti, S. (2005). Dampak tayangan film di televisi terhadap perilaku anak. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Desti, S. (2005). Dampak tayangan film di televisi terhadap perilaku anak. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2(1).

Intani, R. (2018). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWAL ISI SIARAN TELEVISI. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1(2), 375-386.

Skripsi :

Asep Bachtiar. (2018) *Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah*.

Muhammad Reynaldo, (2019). *Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) Kepada Lembaga Penyiaran*.

Fajriah Agustini, (2017). *Analisis Literasi Analisis Literasi Media Ibu Rumah Tangga Dalam Media Prenting Pada Anak Usia Dini Menonton Televisi di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh*.